

Seminar Publik Perlindungan Sosial ILO

Peran Pemangku Kepentingan dalam Reformasi Perlindungan Sosial
Di Afrika Selatan


Dr. Virginia Petersen
25 Agustus 2021

Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial mencakup pemberian layanan dasar seperti air, sanitasi, kesehatan, pendidikan, perumahan, nutrisi dan konseling di satu sisi. Di sisi lain adalah cakupan penting pelaksanaan program jaminan sosial dalam bentuk jaminan sosial, bantuan sosial, asuransi sosial dan intervensi pasar tenaga kerja. Layanan ini diberikan oleh sejumlah departemen pemerintah. (Petersen, 2016; UNRISD, 2010; Yemtsov, 2013)

Perlindungan sosial merupakan jaring pengaman untuk menangani kemiskinan, kerentanan dan ketimpangan. Ini juga digambarkan sebagai polis asuransi bagi warga miskin untuk menghadapi penuaan, disabilitas, penyakit, pengucilan dan mengurangi dampak paparan risiko dan guncangan misalnya pengangguran dan bencana. PS merupakan alat untuk mempromosikan keadilan sosial dan pembangunan inklusif.

Perlindungan sosial didefinisikan sebagai serangkaian intervensi formal dan informal yang bertujuan untuk mengurangi risiko sosial dan ekonomi, kerentanan dan kekurangan bagi semua orang dan memfasilitasi pertumbuhan yang adil. (ILO, 2014)



Fungsi PS

Perlindungan

langkah bantuan sosial yang memastikan penghidupan dasar bagi orang miskin (*bantuan tunai, voucher, makanan tambahan, bantuan makanan*)

Pencegahan

langkah asuransi sosial untuk menghentikan orang rentan jatuh ke dalam kemiskinan (*jaminan sosial, cadangan beras, asuransi terindeks cuaca*)

Promosi

dukungan penghidupan untuk melindungi dan meningkatkan penghidupan (*bantuan aset, subsidi input, makanan sekolah, pekerjaan umum*)

Transformasi

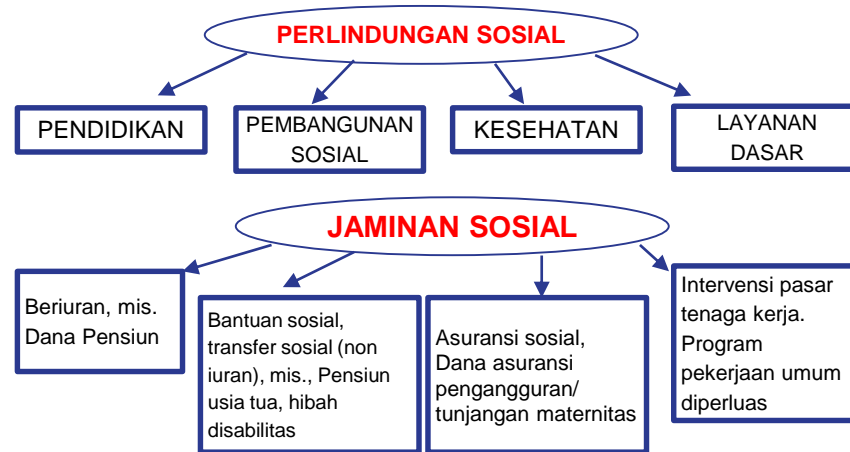
langkah inklusi sosial yang meningkatkan hak sosial dan ekonomi (*prosedur pengaduan, pemberantasan pekerja anak, anti diskriminasi*)

Generatif

langkah inovasi jaminan sosial untuk meningkatkan hak sosial dan ekonomi di masa krisis

Jaminan Sosial

Jaminan sosial didefinisikan sebagai langkah swasta atau publik untuk melindungi individu, keluarga dan rumah tangga dari dampak bencana, pekerja miskin dan hilangnya pendapatan sebagai akibat dari pengangguran, hari tua, kematian, disabilitas, kecelakaan kerja, rawat inap yang lama dan rehabilitasi, dan maternitas. (Petersen, 2016)



Pengeluaran pemerintah di bidang perlindungan sosial dan terutama jaminan sosial disebut “upah sosial”.

Lanskap PS Afrika Selatan

1. Departemen Kesehatan

- Kesehatan Masyarakat Gratis
- Askes Nasional (NHI) - Fase Percontohan
- Kesehatan dan keselamatan Kerja

2. Departemen Pendidikan Dasar

- Dukungan Nutrisi untuk Siswa
- Pendidikan Sekolah Umum Gratis
- Pendidikan khusus


3. Departemen Pendidikan Tinggi

- NSFAS (Skema Bantuan Keuangan Mahasiswa Nasional)

4. Departemen Pertanian

- Subsidi Pertanian
- LMI: Penyuluh
- Koperasi

5. Departemen Tenaga Kerja

- Dana Hari Tua
 - Dana Asuransi Pengangguran
 - Dana Tunjangan Kecelakaan
 - Tunjangan Maternitas
 - TERS - Covid-19
 - NEDLAC
- 

Lanskap PS Afrika Selatan

6. Departemen Pembangunan Sosial

- Program Bantuan Sosial (SASSA)
- Hibah Covid-19
- Program Jaring Pengaman Sosial – Dukungan LSM

7. Departemen Keuangan

- Dana Pensiun Pegawai Pemerintah (GEPF)
- Dana Pensiun Khusus

8. Departemen Pemerintah & Tradisi Lokal

- Listrik Gratis (terbatas)
- Air Gratis (terbatas)

9. Departemen Perhubungan

- Dana Kecelakaan Jalan Raya

10. Departemen Pekerjaan Umum

- Program Jaminan Kerja (EPWP)

Sektor Swasta

- Asuransi & Anuitas Pensiun
- Skema Bantuan Medis
- Asuransi Pengganti Pendapatan



REFORMASI KUNCI JAMINAN SOSIAL

- Penghapusan manfaat berbasis ras
 - Hibah perawatan (1 jt)
 - Layanan kesehatan publik
 - Pengembangan usia dini (ECD)
 - Perkebunan swasta
 - Dana hari tua (lumpsum)

 - Pensiun pemerintah (lumpsum)

 - Pensiun manfaat pasti
 - Manfaat terfragmentasi
 - Sistem manual
 - Satu sistem
 - Pengangguran sector rentan
 - Dana kecelakaan kendaraan bermotor
 - Departemen pelaksanaan generik
- > • Hibah bantuan anak (12 jt)
 - > • Asuransi kesehatan Nasional
 - > • ECD Wajib
 - > • Koperasi
 - > • Anuitisasi wajib sebagian untuk pembayaran pensiun bulanan
 - > • Pembayaran bulanan/sepertiga tunai & dua per tiga pembayaran bulanan – organisasi pihak ketiga
 - > • Pensiun iuran pasti (sektor swasta)
 - > • Landasan jaminan sosial (upah sosial)
 - > • Sistem terotomatisasi
 - > • Sistem dapat saling dioperasikan (interoperable)
 - > • LMI: Pekerjann Umum yang diperluas (EPWP)
 - > • Dana kecelakaan jalan
 - > • SPV: Agen pelaksana: SASSA, NYDA, NDA

Perubahan Membutuhkan Kerangka mutu Layanan

Dalam bentuknya yang paling sederhana, kerangka mutu menetapkan tujuan kualitas yang jelas bagi organisasi untuk memberikan nilai dan hasil, terhadap kebijakan, misi, dan nilai yang dinyatakan, dengan cara terbaik dan termurah.

Perubahan adalah pergerakan keluar dari keadaan saat ini (bagaimana hal-hal hari ini), melewati keadaan transisi, dan ke keadaan masa depan (bagaimana hal-hal akan dilakukan)(Creasey, T. 2020)

Manajemen perubahan adalah proses yang diluncurkan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja saat ini, meraih peluang baru, atau menangani isu-isu utama (Jouany & Matrick. 2020)

Pemangku kepentingan harus diberi banyak saluran untuk menggunakan “suara” mereka.

Ini mengharuskan ekosistem perlindungan sosial, khususnya Dewan & Manajemen, harus terbuka untuk “mendengarkan” rancangan reformasi yang berhasil dan implementasi perubahan yang diperlukan.



Hasil Utama dari suatu Kerangka

Tata kelola – tata kelola kerangka mutu melibatkan beberapa unsur, misalnya, mengidentifikasi tujuan dan prinsip kerangka mutu, dan menentukan struktur pemerintah. Tata kelola juga melibatkan identifikasi pemangku kepentingan dan mitra dan klarifikasi peran dan tanggung-jawab mereka.

Setelah Anda menetapkan tujuan, pengukuran, dan daftar proyek Anda yang akan membawa peningkatan, Anda harus memetakan pemangku kepentingan Anda.

Pemangku kepentingan dapat didefinisikan sebagai kelompok yang tindakannya mempengaruhi institusi: bisa jadi staf, warga, bisnis dan lain-lain.



Analisis Pemangku Kepentingan

- Analisis pemangku kepentingan merupakan salah satu langkah pertama yang harus Anda lakukan dalam suatu proyek perubahan.
- Analisis ini memungkinkan Anda mengidentifikasi setiap orang yang memiliki kepedulian atau kepentingan yang perlu dilibatkan.
- Setelah Anda berhasil menyusun daftar lengkap, selanjutnya Anda perlu mengkategorisasikannya: mulai dari orang dengan keterlibatan terbesar, hingga individu atau kelompok yang lebih perifer.
- Semakin penting pemangku kepentingan untuk keberhasilan proyek, semakin banyak waktu dan sumberdaya yang perlu Anda curahkan untuk mempertahankan keterlibatan dan komitmen mereka

Memposisikan Pemangku Kepentingan

| Disposisi | Respons terhadap perubahan | Tindakan |
|-------------------------|---|--|
| Komitmen | Ingin perubahan terjadi. | Bersedia membuat struktur, sistem dan kerangka apapun yang diperlukan agar bisa berjalan. |
| Penerimaan | Ingin perubahan terjadi dan akan mencurahkan waktu dan energi untuk membuatnya terjadi di dalam kerangka tertentu. | Bertindak di dalam semangat kerangka. |
| Kepatuhan tulus | Melihat kebaikan pada apa yang diusulkan, melakukan apa yang diminta pada mereka dan berpikir proaktif tentang apa yang dibutuhkan. | Bertindak mengikuti apa yang tertulis dalam kerangka. |
| Kepatuhan formal | Dapat mendeskripsikan manfaat dari apa yang diusulkan dan tidak menentangnya. | Mereka melakukan apa yang diminta pada mereka. Berpegang pada apa yang tertulis dalam kerangka. |
| Kepatuhan setengah hati | Tidak menerima bahwa terdapat manfaat pada apa yang diusulkan dan tidak sejalan dengannya. | Mereka cukup melakukan apa yang diminta pada mereka agar posisi mereka aman. Menyuarakan penentangan dan mengharapkan kegagalan. Menafsirkan apa yang tertulis dalam kerangka. |
| Tidak patuh | Tidak menerima bahwa terdapat manfaat dan tidak ada ruginya menentang usulan itu. | Tidak mau melakukan apa yang diminta pada mereka. Bekerja di luar kerangka. |
| Apatis | Tidak mendukung atau menentang usulan itu – menjalani saja . | Tidak peduli dengan kerangka. |

Pemangku Kepentingan Afrika Selatan

Proses Pelibatan

Identifikasi

Konsultasi

Mekanisme Pelaporan

Jenis Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan Primer

- Menteri (Mandat Politik, Kabinet & Parlemen)
- Klaster Sosial, Dewan Penasehat Menteri & NEDLAC
- Manajemen Dewan & Eksekutif
- Anggota & Penerima Manfaat

Pemangku Kepentingan Sekunder

- Staf Dukungan Departemen & Lembaga
- Masyarakat Rentan
- Penyedia Jasa Pihak Ketiga
- Kelompok Advokasi
- Bank
- Kartu Master/VISA



FORUM PEMANGKU KEPENTINGAN KUNCI AFSEL

Dewan Ekonomi, Pembangunan dan Perburuhan Nasional (National Economic, Development and Labour Council /NEDLAC)

NEDLAC memastikan partisipasi public efektif dalam kebijakan dan peraturan pasar kerja dan sosial-ekonomi, untuk memfasilitasi kosensus dan kerjasama antara pemerintah, pekerja, dunia usaha dan komunitas dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi Afrika Selatan.

NEDLAC terdiri dari perwakilan pemerintah, organisasi pekerja dan masyarakat sipil (atas nama komunitas). Mereka bekerja sama melalui pemecahan masalah dan negosiasi tentang isu ekonomi, perburuhan dan pembangunan dan tantangan terkait yang dihadapi negara.

NEDLAC terdiri dari 4 kamar: Pasar kerja, Kebijakan pembiayaan public dan moneter, Pembangunan dan Perdagangan dan Industri

Keterwakilan NEDLAC :

Government:
Parliament
Cabinet- Social Cluster
Ministerial Advisory Councils and Boards
Social Transformation Committees
Departments, SOE's and Agencies

Federasi serikat pekerja:

COSATU
FEDUSA
NACTU
CONSAWU
SAFTU

Organisasi bisnis

BUSA
Small Business Forum
Chamber of Business
Business Unity South Africa
Black Business Forum

Organisasi masyarakat sipil:

Black Sash
Treatment Action Campaign
NGO Coalition
Social Change Assistance Trust
South African Council of Churches
Academic Institutions
Child Justice Alliance
Organisasi internasional

Badan Jaminan Sosial Afrika Selatan (SASSA)

Studi Kasus

Lembar Fakta

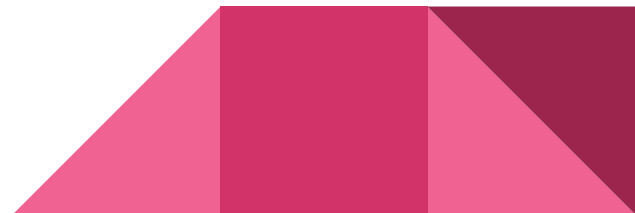
SASSA memiliki:

- Sekira 8.269 Staf
- 9 Kantor Wilayah & 46 kantor Distrik
- 389 Kantor Lokal
- 1.163 Titik Layanan
- 38 Truk Keliling
- 1.740 Titik Pembayaran Terkontrak
- 1 Pusat Panggilan Nasional
- R7,6 miliar Anggaran Administrasi
- Pelanggan kami
- Orang lanjut usia, penyandang disabilitas dan anak-anak
(17,8 juta hibah sosial dibayarkan kepada 11.054.128 penerima manfaat (Penerima dewasa))
- Sekira 32% penduduk memanfaatkan
- Transfer Bantuan Sosial - R162 miliar pertahun
- Metode pembayaran: 71% Bank Pos (Pemerintah), 29% Bank Umum.

- SASSA merupakan Badan Publik Bagan 3A yang didirikan pada bulan April 2006 berdasarkan UU Parlemen (SASSA Act, 2004)
- Tujuan SASSA adalah untuk:
 - bertindak sebagai agen tunggal yang akan memastikan pengelolaan, administrasi dan pembayaran bantuan sosial yang efisien dan efektif; dan
 - pada akhirnya berfungsi sebagai lembaga untuk mengelola manfaat jaminan sosial yang lebih luas.
- Operasional SASSA dan Program Bantuan Sosialnya, yang meliputi Bantuan Sosial (SRD): produk segar, selimut dan seragam sekolah, didanai sepenuhnya oleh pemerintah.
- UU Bantuan Sosial tahun 2004 memberikan kerangka hukum untuk pemberian bantuan sosial.
- Selaras dengan hasil NDP 13 sub-hasil 4

Jumlah Total Hibah Sosial yang Dibayar

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Tanggungun Perawatan | (R 1 780.00) 150,001 |
| Dukungan Anak | (R 430.00) 12,452,072 |
| Anak Asuh | (R 1000.00) 386,019 |
| Disabilitas | (R 1 780.00) 1,048,255 |
| Hibah Bantuan | (R 490.00) 221,989 |
| Hari Tua (R1 780 / R1800.00 (>75)) | 3,553,317 |
| Veteran Perang | (R 1 800) 92 |
| TOTAL | 17 811 745 |

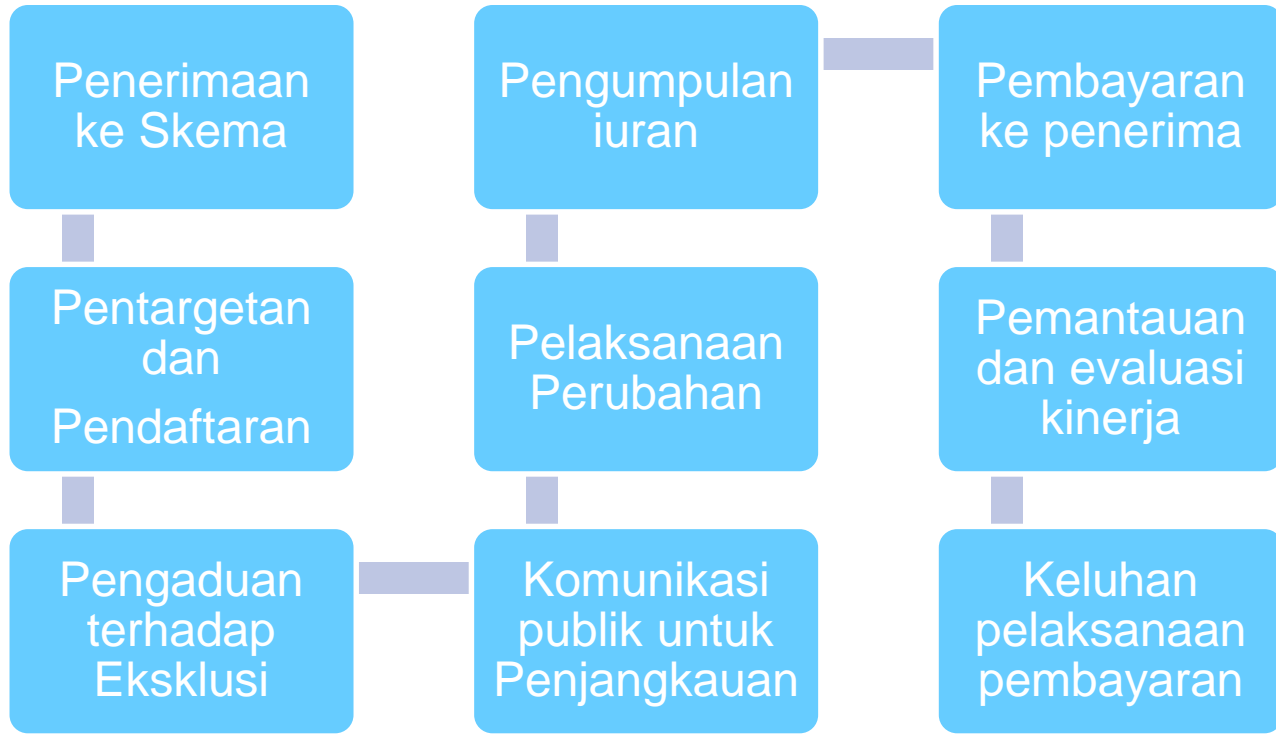


Metode Kesadaran dan Mobilisasi - Model Afrika Selatan

- Menggunakan Tokoh Terkemuka/Terkenal
- Berkomunikasi, Penelitian dan Analisis
- Jangkauan Politik
- Pertemuan masyarakat –Mikhondzo
- Penjangkauan Kelompok Sasaran
- Strategi komunikasi
 - Radio & TV – Bincang-bincang & Iklan
 - Media Cetak – Papan Reklame, Koran, Poster & Brosur



Siklus Operasional untuk Jaminan Sosial




Rencana Peningkatan Layanan Mutu

- 1. **Mekanisme Penargetan**
 - Strategi konsultasi dan komunikasi baru
 - Peningkatan penargetan disabilitas
 - Melakukan means-test medis dan sosial
- 2. **Mekanisme Pendaftaran**
 - Pendaftaran ulang
 - Penggunaan kedua pendekatan yang diperkenalkan.
 - Pendekatan Penjangkauan Survei
 - Mikhondzo
 - ICROP
 - Pendaftaran pendekatan berdasarkan permintaan
 - Seragam, Label Nama, Manajemen Antrian, Pusat Panggilan

- **3. Pendaftaran : Mekanisme Proses Pengajuan permohonan**
 - Formulir Permohonan
 - Perombakan Kantor
 - Pelatihan Staf
 - Proses aplikasi 4 Langkah
 - EPWP
 - Automasi Pendaftaran
 - Berkurangnya waktu proses permohonan

 - **4. Pembayaran: Mekanisme Solusi Pengiriman Pembayaran Modern**
 - Kartu Pintar Tertaut Biometrik
 - Perluasan Opsi Fasilitas Pembayaran
 - Cara pembayaran
 - Automasi
 - Audit Tanpa Pengecualian

 - **5. Mekanisme Pengaduan**
 - Informal : Kotak Pengaduan
 - : Pusat Panggilan
 - Formal : Proses Tinjauan Internal
 - : Pengadilan Banding
- 

Mei 2011 – Maret 2012

- Cara pembayaran
- Model pembayaran
- Automasi
- Peningkatan pemberian layanan
 - A. Peningkatan kantor lokal
 - ✓ (cetak biru disusun; dan
 - ✓ 72 ditingkatkan)
 - B. Standarisasi proses admin hibah
 - ✓ Proses pengajuan permohonan 4 langkah dari 7 langkah
 - ✓ Pengurangan formulir pengajuan dari 20+ menjadi 2 halaman
 - C. Peningkatan kapasitas
 - ✓ Model kapasitas untuk kantor lokal
 - ✓ Prioritisasi ulang kompensasi karyawan ke level dana 5 dan 7 di LO
 - ✓ Pengenalan EPWP
- Audit tanpa pengecualian

April 2012 – Maret 2013

- Pembayaran
 - Registrasi ulang – 20,7 jt
 - Migrasi ke sistem pembayaran baru
- Peningkatan kantor lokal (109)
- Penguatan unit pengelolaan penipuan
- Peningkatan kapasitas
 - Mendapatkan otorisasi dari bendahara untuk memindah dana daribarang & jasa ke COE ke level dana 5 dan 7
 - Level 5 dan 7
 - EPWP
 - Posisi eksekutif terisi (pencapaian 95%)
- Seragam staf diperkenalkan
- Model pembayaran
- Biometrik untuk staf
- Audit tanpa pengecualian

April 2013 – Maret 2014

- Pendaftaran ulang pembersihan kantor kembali
 - Penghematan R 2 milyar
 - Pembatalan sukarela CSG
- Model pembayaran – Komite Penasihat Menteri diangkat
- Peningkatan kantor lokal (72)
- Manghubungkan tunjangan hibah – koperasi – seragam sekolah
- Manajemen penipuan yang efektif
- ICROP (- Mikondzo)
- Seragam staf
- Review jaminan simpanan (ditangguhkan)
- Biometrik untuk staf
- Audit tanpa pengecualian
- Litigasi Tender pembayaran

April 2014 – Maret 2015


- Tender pembayaran (direvisi, diiklankan, difinalisasi)
- Model Pembayaran
 - Mendukung komite penasihat
 - Laporan kelayakan solusi teknologi pembayaran
 - Analisis sidik jari
 - Pendaftaran berkesinambungan
- Automasi
 - Biometrik untuk staf (bangunan dan sistem)
 - Solusi pemindaian untuk pusat manajemen catatan
 - Laporan kelayakan sumber pendaftaran bersama
- Peningkatan pemberian layanan
 - Peningkatan kantor lokal (52)
 - Titik pembayaran (144)
 - Waktu penyelesaian 10 dicapai
 - Menerapkan Mikondzo sebagai kendaraan untuk meningkatkan pemberian layanan (714 wilayah dikunjungi)
- Audit tanpa pengecualian

April 2015 – Maret 2016

- Tender pembayaran difinalisasi
- Model Pembayaran
 - Membentuk kantor proyek khusus untuk mendukung alur kerja
 - Menyusun rencana transisi
 - Pendaftaran berkesinambungan
 - Mekanisme penyelesaian sengketa untuk pemotongan
- Automasi
 - Biometrik untuk staf (bangunan dan sistem)
 - Solusi pemindaian untuk pusat manajemen catatan
 - Sumber pendaftaran bersama dimulai
- Peningkatan pemberian layanan
 - Memulai proyek penghapusan titik pembayaran ruang terbuka (4000 teridentifikasi)
 - Menerapkan Mikondzo sebagai kendaraan untuk meningkatkan pemberian layanan (411 dan 63 wilayah dikunjungi melalui ICROP dan Mikondzo)
 - Meninjau proses 4 langkah ke 2 langkah
 - Waktu penyelesaian – 10 hari
- Audit tanpa pengecualian

Struktur untuk Mendukung Implementasi Rencana Mutu Layanan

Tahap persyaratan bisnis harus terdiri dari:

- Penunjukan manajer proyek
 - Pembentukan tim proyek
 - Kesepakatan tata kelola proyek
 - Identifikasi semua pemangku kepentingan
 - Analisis persyaratan, prioritas, kesepakatan dan dokumentasi
 - Penetapan dan kesepakatan garis besar anggaran.
 - Penyelesaian potensi konflik antar unit bisnis dan kesepakatan tentang keseluruhan persyaratan.
 - Proses penandatanganan untuk persyaratan yang disepakati dan metode untuk menyetujui dan menerima perubahan pada persyaratan yang disepakati
 - Rencana pelibatan pemangku kepentingan
- 

Mekanisme Pelaporan

Menteri dan CEO menerima laporan kemajuan melalui metode berikut:

- EXCO
- Manajemen Puncak
- Sesi Tinjauan Kuartalan
- Pelibatan Pemangku Kepentingan
- Proses di Parlemen
- Laporan Tahunan termasuk Laporan Audit



Tanggapan Covid-19 Afrika Selatan

Tanggapan:

- Membentuk dana khusus (APD, Sanitiser, Vaksin) - Kepresidenan
- Skema Bantuan Ketenagakerjaan Sementara (TERS)
 - -minimal R 3.500* per bulan
 - -maksimal R 6.730 per bulan (sebelumnya memperoleh R 17.700 per bulan) - Departemen Tenaga Kerja
- Tunjangan seni kreatif - Departemen Seni & Budaya
- Tes Covid-19 - Departemen Kesehatan Sektor Publik
- Jaminan Sosial (SASSA) - ekspansi horizontal dan vertikal
 - -hibah tunjangan anak - 1 anak R440 + R500 = R940 per bulan
 - 2 children R880 + R500 = R1380 per month
 - (May - October 2020)
 - -OAP, DG, Veteran perang, ketergantungan perawatan, hibah - tambahan R500 per bulan
 - - Covid-19 SRD - R350 per bulan untuk pengangguran
 - Permohonan melalui USSD/WhatsApp/Surel
- LSM dan Sektor Swasta - Masker, sanitiser dan paket makanan

* 1 Rand = 952,46 Rupiah

Tanya-Jawab

Terima Kasih

